

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Ismoyo (2015) berpendapat dalam hasil penelitiannya yang berjudul “PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA” bahwa dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan partisipasi yang baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga mampu membuat perencanaan partisipatif yang dilakukan lebih berbobot. Dengan melihat tujuan yang hendak dicapai sebagaimana diuraikan maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan alat analisis deskriptif kualitatif. Dengan Teknik pengumpulan data dengan cara metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan untuk memperoleh keabsahan data dipakai teknik pemeriksaan menggunakan empat kriteria yaitu derajat credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil yang diperoleh adalah bahwa masyarakatlah yang berperan besar di setiap proses perencanaan untuk mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat maka keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan menjadi faktor penting dan menentukan kualitas partisipasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarfiah & Juliprijanto (2007) dengan judul “MANFAAT BANK SAMPAH BAGI MASYARAKAT DI DUSUN SEMALI DESA SALAMKINCI KECAMATAN BANDONG KABUPATEN MAGELANG”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui manfaat bank sampah terhadap lingkungan, sosial, ekonomi supaya dengan adanya manfaat bank

sampah di Dusun semali semakin meningkat dalam ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan dampak positif terhadap lingkungan yakni membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan yang paling banyak dirasakan masyarakat yaitu berkurangnya tumpukan sampah di lingkungan sekitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharsono (2016) dengan judul “HUBUNGAN PERSEPSI TERHADAP KESEHATAN DENGAN KESADARAN (*MINDFULNESS*) MENYETOR SAMPAH ANGGOTA KLINIK ASURANSI SAMPAH DI INDONESIA MEDIKA”. penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kuantitatif korelasional dengan metode perhitungan statistic tertentu sehingga akan diketahui ada atau tidak ada hubungan antar dua variable. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Menurut Sugiyono (2009) bahwa, total sampling merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Tujuan dari hasil penelitian berasumsi bahwa dengan sebuah persepsi yang positif terhadap kesehatan maka akan mendorong sebuah perilaku sadar terhadap program klinik asuransi sampah di indonesia medika yang harus menyetorkan sampah. Hasil dari penelitian tersebut terdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsi terhadap kesehatan dengan kesadaran menyetor sampah dengan pembuktian hasil analisis yang memunculkan nilai r sebesar 0.468 dengan nilai $p < 0,01$. Bahwa semakin positif persepsi terhadap kesehatan pada diri seseorang maka akan meningkatkan kesadaran dalam menyetor sampah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliadi, (2012) dengan judul “ PEMUDA INDONESIA DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua alternatif kemitraan yang dapat dikembangkan oleh wirausaha sosial yakni kemitraan dengan institusi publik dan kemitraan dengan korporasi. Disisi lain kewirausahaan sosial juga merupakan alternatif guna mengatasi masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah alat analisisnya menggunakan alat analisis kuantitatif dengan metode uji beda (T-test) dan selain berfokus pada perbedaan biaya kesehatan juga membahas mengenai bisnis sosial yang dikembangkan oleh Indonesia Medika dengan cara klinik asuransi sampah.

B. LANDASAN TEORI

1. Asuransi

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dalam perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak membayar kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang (Salim, 2007).

Asuransi pada umumnya diadakan karena adanya kebutuhan akan peralihan risiko semata-mata dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Peralihan risiko merupakan suatu kebutuhan pribadi dari satu pihak dalam hal ini adalah penanggung dengan di dasari adanya kata sepakat sebagai perjanjian asuransi/

pertanggungan dengan adanya kata sepakat sebagai landasan demi suatu perjanjian.

Dengan adanya peralihan pihak tersebut yang didasari oleh perjanjian maka akan timbul konsekuensi pihak yang mengalihkan risiko tadi harus membayar premi kepada pihak lain. (Prakoso,1987). Adapun tujuan asuransi yang merupakan setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu, maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya.(Prakoso,1987)

Menurut Prof. Ny. Emy Pangaribuan Simanjuntak, SH Asuransi itu mempunyai tujuan yang merupakan mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.

Menurut paham ekonom, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena asuransi bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (financial loss), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (Purba, 1992).

Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, dimana penanggung mengikat diri karena tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya

keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu (Purba,1992).

2. Asuransi sosial

Asuransi sosial umumnya lebih banyak menyangkut “kesejahteraan sosial” dari masyarakat, daripada arti mempertanggungkan resiko-resiko kerugian. Agar dapat membedakan dengan nyata pengertian asuransi jiwa dengan asuransi sosial, perlu dimengerti makna dan unsur-unsur yang terdapat pada asuransi sosial tersebut. Contoh asuransi sampah yaitu seperti pengobatan, jaminan hari tua, pensiun. (Salim, 2007).

Secara luas, asuransi sosial itu meliputi risiko-risiko sosial. Risiko sosial adalah segala risiko yang terdapat dalam masyarakat. Asuransi sosial seringkali juga disebut asuransi pemerintah karena diadakan dan diwajibkan oleh pemerintah terhadap golongan-golongan masyarakat tertentu.

Risiko sosial yang hanya sekarang adalah beban biaya perawatan pengobatan, korban kecelakaan kendaraan, pengangguran, kompensasi tenaga kerja, tunjangan ketidakmampuan, dan lain-lain (Ali, 1993).

Asuransi sosial yang merupakan asuransi wajib merupakan perlindungan satu-satunya bagi sebagian besar penduduk. Pengalaman menunjukkan bahwa bantuan pemerintah kepada bagian terbesar penduduk tidak cukup memberikan perlindungan keuangan bagi diri mereka dan keluarga terhadap usia tua, kematian, cacat, dan pengangguran (Ali, 1993).

Dalam hubungan ini dapat kita lihat bahwa, sebenarnya seseorang melakukan penabungan. Bedanya dengan menabung biasa ialah dalam cara yang

dipakai ialah secara tidak langsung. Sedangkan yang diartikan dengan menabung (saving), ialah bagian daripada pendapatan yang tidak dikonsumsi, digunakan untuk disimpan. Penabungan dilakukan dengan sukarela (voluntary).

Asuransi sosial umumnya lebih banyak menyangkut kesejahteraan sosial dari masyarakat, daripada arti mempertanggungkan resiko-resiko kerugian. Asuransi sosial dapat dirumuskan secara umum sebagai segala macam yang melindungi orang terhadap resiko sosial. Bahwa intinya asuransi sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang dijamin adalah resiko sosial, jaminan merupakan beban masyarakat seluruhnya (Salim, 1989).

Usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud berupa jaminan sosial yang merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat, yang dalam hal ini berwujud asuransi sosial. Asuransi sosial itu berkaitan dengan perlindungan terhadap jaminan sosial dalam masyarakat. (Prakoso, 1987)

Pada dasarnya asuransi sosial hampir sama dengan asuransi pada umumnya, sehingga unsur asuransi sosial itu adalah:

- a. Penanggung (biasanya suatu organisasi di bawah wewenang pemerintah).
- b. Tertanggung (biasanya masyarakat luas anggap/golongan masyarakat tertentu)
- c. Resiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan terlebih dahulu)
- d. Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain).

(Prakoso, 1987)

Asuransi sosial dalam hal taspen, memberikan sumbangan yang penting untuk pengembangan ekonomi melalui tabungan masyarakat yang dibutuhkan untuk investasi yang berasal dari para anggotanya.(Prakoso, 1987).

Dalam pasal 5 ayat (1) PP No. 25 tahun 1981, yang di maksud sebagai kewajiban peserta adalah memberi keterangannya. Dan dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan keterangan ini meliputi nama, umur, tempat tinggal, jumlah dan perubahan status keluarga serta keterangan lain yang diperlukan. Keterangan ini dibuat/ disahkan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang berwenang. Di indonesia, asuransi sosial merupakan salah satu dari beberapa jenis asuransi lainnya, Hal ini disebabkan timbulnya asuransi sosial berbeda latar belakangnya dengan asuransi yang lain.

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara local, regional maupun nasional. Asuransi sosial menyangkut kepentingan masyarakat agar penyelenggaraannya efektif, terarah, dan mempunyai landasan hukum, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing segi jaminan sosial, seperti jaminan sosial atas tenaga kerja perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah, jaminan sosial pegawai negeri dan pensiunan, jaminan sosial hari tua, dan sebagainya.

Melalui peraturan perundang-undangan itu, pemerintah juga menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi wajib agar setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam asuransi itu memikul kewajiban sosial dan memperoleh jaminan sosial. Selain itu, oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat, maka tidak diperkenankan sembarang badan/ lembaga asuransi menyelenggarakan asuransi

sosial, tetapi hanya badan/lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah (Purba,1992).

3. Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan riset-riset akademik dan sejumlah inisiatif konkret yang dikembangkan di seluruh dunia, Komisi akhirnya mengidentifikasi dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan. Paling tidak secara prinsip, dimensi-dimensi ini harus diperhitungkan. Dimensi ini membentuk kesejahteraan masyarakat.

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Lingkungan Hidup
- d. Hubungan dan kekerabatan sosial

Dari beberapa dimensi diatas dapat di jelaskan sebagian untuk kesehatan merupakan ciri dasar yang memengaruhi durasi dan kualitas hidup seseorang. Namun dari segi pendidikan itu sendiri tetap penting bagi kualitas hidup masyarakat. Adapun manfaat sosial untuk menjangar luar sampai ke kesehatan dan peluang mendapatkan pekerjaan, begitu pula untuk lingkungan hidup di sekitar (Stiglitz, 2011).

Di indonesia hal ini sangat sesuai dengan usaha-usaha pemerintah guna mewujudkan program kesejahteraan sosial, dalam rangka lebih menjamin akan adanya kesejahteraan masyarakat. (Prakoso, 1987).

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat bukanlah hal yang mudah, membutuhkan arah serta rangkaian usaha pertumbuhan dan

perubahan berencana yang dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar dan bersifat multidimensional, berupa pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. (Siagian,1974)

Konsep kesejahteraan masyarakat muncul sebagai indikator untuk mengukur hasil-hasil pembangunan ketika indicator yang selama ini biasa digunakan yaitu pendapatan nasional atau Gross National Product (GNP) dianggap kurang memuaskan (Qodriyatun, 2014).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan tiga indicator yaitu: penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan meningkatnya pendapatan perkapita rakyat (Qodriyatun, 2014).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat mengacu pada ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat Bappenas, yaitu adanya penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kaitannya dengan pengolahan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 adalah memungkinkan kegiatan pengolahan sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Qodriyatun, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan masyarakat yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum

terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial di negara.

Bahwa tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi dari kepuasan individu-individu, pengertian dasar ini mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua area perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan, Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut biasa direpresentasikan secara agregat. Dikatakan sebagai atribut agregat, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan bersifat kompleks karena multidimensional, mempunyai keterkaitan antara dimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu intensitas tunggal yang mempresentasikan kepada masyarakat tetapi juga membutuhkan suatu representasi distribusional dari keadaan itu (Wismuaji, 2008:2).

4. Lingkungan Sosial

Kompleksnya unsur dan kait-mengkait antara unsur di dalam suatu lingkungan sosial yang didefinisikan maka adalah wajar bila tidak seluruh kalangan dan semua lapisan paham apa yang dinamakan lingkungan sosial. Bahkan apabila dielaborasi lebih dalam lagi, maka akan ditemukan beberapa macam konsep teknis yang boleh jadi akan tampak seperti menjadi lebih rumit. Namun hal itu harus dilakukan agar lingkungan sosial tersebut dapat dimasukkan

dan diperlakukan sebagai suatu entitas yang dapat dikelola melalui proses lingkungan sosial. Secara teoritis lingkungan sosial dapat diartikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan :

- a. Ketahanan sosial (daya dukung dan daya tamping sosial setempat)
- b. Keadaan ekosistemnya
- c. Tata ruangnya
- d. Kualitas sosial setempat (kualitas objektif dan subjektif)
- e. Sumber daya sosial (potensi) dan keterbatasan (pantangan) yang bersifat kemasyarakatan (yang tampak dalam wujud pranata, pengetahuan lingkungan, dan etika lingkungan).
- f. Kesesuaian dengan asaz, tujuan dan sasaran lingkungan hidup.

Sebagaimana tersebut dalam seksi-seksi terdahulu, tindakan lingkungan sosial ini bukannya timbul begitu saja. Tindakan ini karena banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi akibat pesatnya penyelenggaraan pembangunan sehingga sosial yang sudah ada sebelumnya tidak lagi cukup antisipatif. Kesenambungan kehidupan dalam lingkungan sosial tercipta karena keberhasilan interaksi-interaksi manusia dengan lingkungan alami : memanfaatkan sumber daya alam untuk hidup, menciptakan berbagai kemudahan dengan memodifikasi lingkungan alam menjadi habitat-habitat nyaman (Purba, 2005).

5. Bisnis Sosial

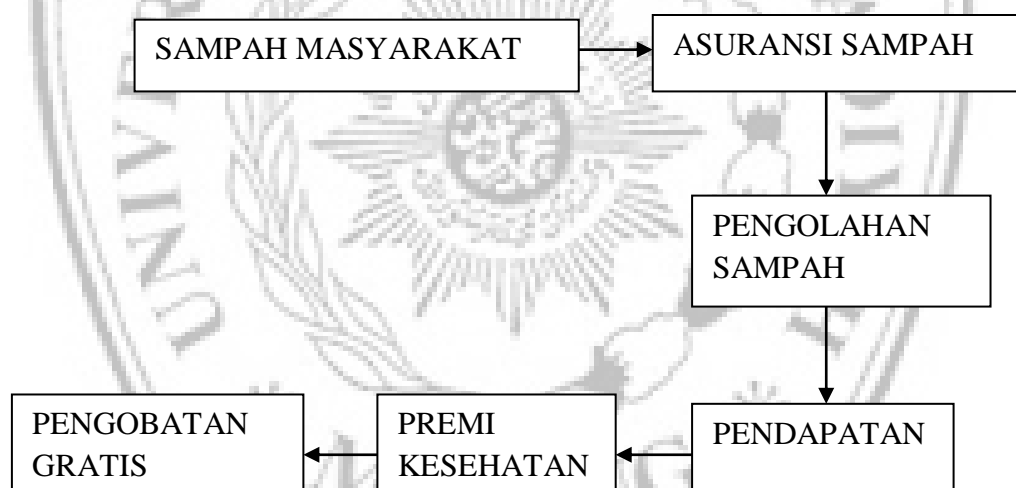
Fenomena yang menarik saat ini adalah bisnis sosial atau yang lebih dikenal dengan sebutan kewirausahaan sosial, yang hanya berfokus terhadap keuntungan materi dan terhadap kepuasan pelanggan, dan juga signifikansinya terhadap kehidupan masyarakat, dan wirausaha sosial dengan manfaat perilaku kewirausahaan yang lebih berorientasi untuk mencapai tujuan sosial dan tidak lebih mengutamakan perolehan laba, atau laba yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Dalam kewirausahaan sosial tidak hanya kalangan masyarakat menengah atas tetapi masyarakat menengah bawah juga bisa berbagi. Kewirausahaan Indonesia mulai tumbuh ditandai dengan adanya lokakarya, seminar yang mengenai kewirausahaan sosial maupun bisnis sosial, dengan adanya semacam itu dapat memberikan terhadap pengembangan kewirausahaan sosial dan dapat diyakini bahwa kewirausahaan sosial merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia selama ini.

Kewirausahaan sosial merupakan suatu proses yang melibatkan penggunaan dan penggabungan sumber daya secara inovatif untuk membuka peluang mempercepat perubahan sosial dan atau memenuhi kebutuhan sosial (Mair dan Marti, 2006). Dan dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja yang mana karakteristik kewirausahaan sosial di antaranya yakni penciptaan social value, innovation dan adanya economic activity (Hulgard, 2010). Dengan adanya ilmu kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan sangat berdampak positif pada penciptaan lapangan

kerja, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang diterapkan adalah kewirausahaan sosial. Konsep dalam kewirausahaan sosial berbeda dengan konsep business entrepreneur meskipun mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi tetapi tetap saja memiliki semangat menumpuk kekayaan pada dirinya sendiri. Sedangkan wirausaha sosial memiliki kekayaan tersebut digunakan untuk menolong masyarakat (Juwaini, 2011 :257).

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan tinjauan pustaka yang diperkuat dengan penelitian terdahulu dapat dirumuskan kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1.KerangkaPemikiran

Keterangan :

Dengan adanya Klinik Asuransi Sampah sebagian anggota masyarakat yang sudah menjadi anggota Klinik Asuransi Sampah tersebut. Dengan itu masyarakat cukup menyerahkan sampah masyarakat yang berasal dari lingkungan sekitar maupun di rumah masyarakat itu sendiri dan sampah yang sudah terkumpul akan diambil

oleh tim Klinik Asuransi Sampah setiap minggunya. Sampah yang sudah terkumpul kemudian dipilah antara sampah organik maupun anorganik dan sampah organik bisa di buat pupuk takakura sementara untuk sampah anorganik yang dapat di daur ulang dan dijual ke pengepul yang mana hasil penjualan ini menjadi pendapatan operasional bagi klinik asuransi sampah. Secara tidak langsung pendapatan yang diterima oleh klinik asuransi sampah merupakan premi yang dibayarkan masyarakat kepada klinik asuransi sampah melalui sampah yang telah diambil oleh tim klinik asuransi sampah setiap minggunya. Setelah itu masyarakat yang mengikuti menjadi nasabah asuransi sampah akan mendapatkan feedback yang berupa pengobatan gratis.

